

Effectiveness of the Village Financial System in the Realization of E-Government in the Village Kebonagung Sukodono District Sidoarjo Regency

[Efektivitas Sistem Keuangan Desa dalam Pewujudan E-Government di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo]

Ivan Eko Hardi Pramudio¹⁾, Ilmi Usrotin Choiriyah ^{*2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: ilmiusrotin@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the Village Financial System in supporting the realization of e-government in Kehonagung Village, Sukodono District, Sidoarjo Regency. SISKEUDES is an application designed to enhance transparency, accountability, and efficiency in village financial management, in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018. The research method used is qualitative descriptive, with data collection conducted through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that although SISKEUDES has been widely implemented and provides benefits in financial recording and reporting, there are several challenges faced by village operators. These challenges include insufficient training, difficulties in adapting to system updates, and a lack of staff, which can hinder data entry into the system and the dissemination of village fund information to the public. The study also identifies that the effectiveness of SISKEUDES highly depends on the quality of human resources, the quality of the system, and the quality of the information produced. Therefore, it is recommended that local governments provide better support in the form of training and assistance to village officials. By doing so, SISKEUDES is expected to function optimally and contribute to improving the quality of public services as well as better village financial management in the future.*

Keywords - Effectiveness; SISKEUDES; E-government

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Sistem Keuangan Desa dalam mendukung perwujudan e-government di Desa Kehonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, SISKEUDES merupakan aplikasi yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SISKEUDES telah diterapkan secara luas dan memberikan manfaat dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh operator desa. Kendala tersebut meliputi kurangnya pelatihan yang memadai, kesulitan dalam beradaptasi dengan pembaruan sistem, serta kurangnya pegawai dapat menghambat penginputan data pada sistem serta penyampaian informasi dana desa kepada masyarakat. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa efektivitas SISKEUDES sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, kualitas sistem, dan kualitas informasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah memberikan dukungan yang lebih baik dalam bentuk pelatihan dan pendampingan kepada perangkat desa. Dengan demikian, diharapkan SISKEUDES dapat berfungsi secara optimal dan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik serta pengelolaan keuangan desa yang lebih baik di masa depan.*

Kata Kunci - Efektivitas; SISKEUDES; E-government

I. PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten [1]. Selain itu, desa juga merupakan struktur pemerintahan terkecil yang terdapat di kalangan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah secara administratif, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tentang Desa merupakan salah satu strategi dari perwujudan Nawacita ke-3 Pemerintahan Jokowi-

JK, yaitu dengan membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah desa. Penerbitan undang-undang desa diharapkan memberikan peluang bagi aparatur pemerintah desa untuk mengelola segala tata pemerintahan serta mengurus pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan berbagai kebijakan [2]. Selanjutnya, dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, mencakup pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat [3].

Kebijakan yang dilakukan untuk mendukung kemandirian desa adalah salah satunya dengan memberikan keleluasaan desa untuk mendapatkan pembiayaan langsung dari APBN tidak lain dalam rangka untuk mencari bentuk dan format ideal yang bisa menempatkan desa sebagai suatu daerah yang memiliki sifat istimewa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia [4]. Pelaksanaan pembangunan desa harus didukung dengan jumlah anggaran yang dialokasikan.

Tabel 1. Jumlah rata-rata alokasi dana desa

Tahun	Dana Desa
2018	Rp. 800.400.000,-
2019	Rp. 933.900.000.-
2020	Rp. 960.600.000,-

Sumber: Hasil Olah Peneliti (2024)

Pada tabel diatas dijelaskan tahun 2018 setiap desa mendapatkan rata-rata alokasi dana desa sebesar Rp 800.400.000,-, tahun 2019 sebesar Rp 933.900.000,-, dan tahun 2020 sebesar Rp 960.600.000,-. Dana Desa yang dialokasikan tahun 2020 sebesar Rp72 triliun diperuntukkan bagi 74.953 desa dan akan disalurkan oleh 169 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Alokasi dana desa tersebut kemudian akan dikelola oleh aparatur pemerintah desa sesuai APBDes yang didapatkan dan diawasi melalui sistem yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk mengantisipasi terjadinya masalah penyelewengan dana desa dan mendukung peraturan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta partisipatif, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk melakukan pengembangan aplikasi yang dinamakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan kebijakan yang dibuat sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana kebijakan tersebut harus dijalankan agar tercapai tujuan dari aplikasi SISKEUDES, yaitu agar pengelolaan keuangan desa bisa lebih bersih, tertib, efektif dan efisien serta terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran [5].

Aplikasi Siskeudes, yang dikenal juga sebagai Sistem Kelola Desa, merupakan sebuah instrumen teknologi yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pengelolaan administratif dan keuangan di tingkat desa [6]. Aplikasi siskeudes ini setiap tahunnya mengalami perubahan sesuai dengan peraturan yang berlaku [7]. Perkembangan sistem keuangan desa telah dipikirkan sejak awal guna untuk mengantisipasi dari pelaksanaan Undang-Undang Desa. Pemikiran dan persiapan tersebut sebanding dengan diberikannya kepedulian oleh Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dilakukannya launching sistem yang bernama Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2015 dan sebagai bentuk dari jawaban dari Rapat Dengar Pendapat Komisi IX pada tanggal 30 Maret 2015 melalui pertanyaan kapan berakhirnya pembuatan aplikasi yang dibentuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta memenuhi rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang bekerjasama dengan Kementrian Dalam Negeri untuk menyusun sistem keuangan desa. SISKEUDES sendiri telah diperluas perkembangannya di desa-desa dalam lingkup NKRI.

Selain itu, sejak tahun 2015, BPKP dan Kemendagri juga mendorong pengembangan kapasitas aparat desa dan pengelola keuangan desa berbasis Siskeudes melalui sosialisasi dan bimbingan teknis. Pada 27 November 2015, Kemendagri mengeluarkan SE Nomor 147/8350/BPD menginstruksikan agar Siskeudes diberikan cuma-cuma. Sosialisasi dan bimtek bagi aparatur pemerintahan desa dilakukan dengan pembiayaan APBD.

Aplikasi Siskeudes merupakan alat bantu yang diperuntukan untuk Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara komputerisasi [8]. Tujuan aplikasi ini agar pengelolaan keuangan desa bisa lebih bersih, tertib, efektif dan efisien serta terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini mempermudah pemerintah desa dalam mematuhi regulasi yang berlaku dan memudahkan pengawasan dari pihak kabupaten atau kota. Selanjutnya, aplikasi ini memungkinkan akses yang lebih cepat dan terstruktur terhadap informasi keuangan desa, baik untuk pemantauan internal maupun eksternal.

Perubahan menuju e-government melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) juga mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan dana desa, karena setiap transaksi tercatat dengan baik untuk audit. Digitalisasi ini juga membantu mempercepat proses administrasi dan memperbaiki sistem pelaporan, sehingga pemerintah desa dapat lebih fokus pada peningkatan pelayanan publik. Transformasi ini mendukung pembangunan desa yang lebih berkelanjutan serta memperkuat hubungan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa melalui keterbukaan informasi keuangan.

Penggunaan aplikasi Siskeudes telah diterapkan di seluruh desa di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sidoarjo, salah satunya di Desa Kebonagung. Siskeudes diharapkan dapat mengoptimalkan administrasi keuangan desa dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Melalui Siskeudes, perangkat desa dapat melakukan pencatatan, pengelolaan, serta pelaporan keuangan secara digital, yang sebelumnya dilakukan secara manual dan sering kali rentan terhadap kesalahan atau kekeliruan pencatatan. Penggunaan Siskeudes di Desa Kebonagung membantu dalam menyederhanakan administrasi keuangan desa, memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan baik, serta memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen nasional untuk mendukung tata kelola keuangan desa yang lebih profesional dan terintegrasi, sehingga dana desa dapat dikelola secara efektif untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. APBDes Kebonagung Tahun 2024

Uraian	Anggaran
Sumber Pendapatan Dana Desa	Rp. 2.453.339.863,00
Belanja Desa Untuk Berbagai Bidang	Rp. 2.450.709.935,01
SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)	Rp. 2.629.927,99

Sumber: Hasil Olah Peneliti (2025)

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa di Desa Kebonagung, sumber pendapatan dana desa sebesar Rp. 2.453.339.863,00 telah dimanfaatkan secara optimal dengan alokasi belanja desa untuk berbagai bidang mencapai Rp. 2.450.709.935,01. Selanjutnya, terdapat pula SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan desa. Pemanfaatan dana yang hampir sepenuhnya terserap ini mencerminkan pengelolaan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Adapun rincian terkait realisasi anggaran dana Desa Kebonagung dalam berbagai bidang antara lain sebagai berikut :

Tabel 3. Rincian Realisasi Belanja Anggaran Dana Desa Tahun 2024

Uraian Kegiatan	Anggaran
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 1.305.972.685,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 506.502.250,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 159.200.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 285.435.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 193.600.000,00
Total Realisasi Anggaran	Rp. 2.450.709.935,01

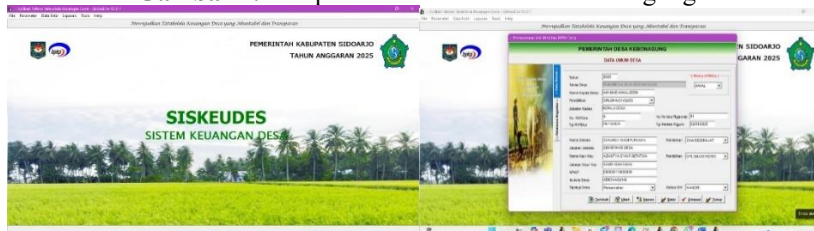
Sumber : Hasil Olah Peneliti (2025)

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa realisasi anggaran belanja dana desa Pada Desa Kebonagung di tahun 2024 digunakan dalam berbagai macam kegiatan di setiap bidangnya yang meliputi Bidang penyelenggaraan pemerintahan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Realisasi belanja dana desa di Desa Kebonagung memberikan manfaat besar dalam berbagai bidang, seperti mendukung operasional pemerintahan desa untuk meningkatkan pelayanan publik, memperkuat solidaritas sosial melalui pembinaan kemasyarakatan, memberdayakan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha, serta menangani bencana dan keadaan darurat dengan cepat melalui penyediaan bantuan logistik dan perbaikan infrastruktur.

Setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, data dan laporan terkait realisasi anggaran, seperti rincian pengeluaran, bukti transaksi, dan hasil pencapaian, akan diinput ke dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sistem ini dirancang untuk pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Penginputan data

ke Siskeudes tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga mempermudah penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang harus disampaikan kepada pemerintah desa dan masyarakat.

Gambar 1. Tampilan Awal Siskeudes Kebonagung



Sumber: Hasil Olah Peneliti (2025)

Pada gambar di atas menjelaskan tampilan awal atau beranda aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kebonagung. Pada beranda ini, pengguna atau operator dapat melihat informasi penting seperti identitas desa, tahun anggaran yang sedang berjalan, dan menu navigasi utama untuk mengakses berbagai modul keuangan. Pada sistem tersebut, terdapat juga form atau kolom yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data transaksi yang sesuai dengan kategori anggaran yang telah disusun dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), seperti belanja langsung, belanja tidak langsung, atau penerimaan desa, yang kemudian akan dihitung dan dicocokkan dengan anggaran yang telah direncanakan. Penginputan ini sangat penting untuk memantau efektivitas penggunaan anggaran desa, memastikan pengeluaran sesuai dengan perencanaan, dan membantu dalam proses pelaporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Untuk Desa Kebonagung, beranda ini akan menjadi langkah pertama dalam proses pengelolaan serta penginputan realisasi anggaran belanja, di mana operator desa dapat memulai pencatatan transaksi dengan mudah dan terstruktur. Fitur-fitur yang tersedia dirancang untuk memudahkan operator dalam menginput data sesuai rencana yang telah ditetapkan, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengeluaran. Tampilan awal ini juga berfungsi sebagai pusat kendali untuk mengakses laporan, memantau anggaran, dan mengelola keuangan desa secara keseluruhan.

Sebelum menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pemerintah Desa Kebonagung dalam membuat laporan keuangan masih menggunakan cara manual dengan Microsoft Excel maupun Microsoft Word, cara manual ini dirasa masih kurang efektif dalam pembuatan laporan keuangan, namun sejak adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini pemerintah desa merasa terbantu karena proses penggunaan aplikasi ini yang mudah dan lebih efektif dari pada menggunakan cara manual. Meskipun demikian, dalam implementasinya, penggunaan siskeudes di lapangan tidak selalu berjalan optimal [9]. Tetapi dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) peneliti melihat masih terdapat kendala dalam penerapannya selama ini. Dalam pengoperasian dan penerapan penggunaan Sistem Keuangan Desa di Desa Kebonagung masih menghadapi sejumlah tantangan yang membuatnya belum sepenuhnya efektif. Salah satu kendala utama yakni pertama, keterbatasan dalam sumber daya manusia, di mana perangkat desa sering kali mengalami kesulitan beradaptasi dengan cepat terhadap pembaruan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Setiap kali sistem diperbarui, dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi pegawai desa untuk memahami dan menguasai fitur-fitur baru, sehingga memperlambat proses administrasi dan pengelolaan keuangan desa. Kedua, sistem Siskeudes juga sering mengalami kendala teknis, seperti down atau errornya server ketika banyak pengguna mengakses aplikasi secara bersamaan. Hal ini mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, karena perangkat desa harus menunggu sampai sistem kembali normal. Ketiga, adalah pada penginputan dana desa di Kebonagung setiap awal tahun pada aplikasi Siskeudes sering kali disebabkan oleh server error, yang mengakibatkan sistem tidak dapat memproses data secara tepat waktu. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam pengajuan dan pencairan dana desa, serta ketidakmampuan perangkat desa untuk mengakses atau mengupdate data anggaran secara real-time. Server error ini biasanya terjadi karena tingginya beban akses pada awal tahun atau kendala teknis lainnya, yang menghambat kelancaran proses administrasi dana desa.

Terkait dengan permasalahan di atas, adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan untuk mengkaji penelitian terkait efektivitas Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini, diantaranya yang pertama adalah Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Tentang Aplikasi Pelaporan Keuangan Desa Di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung), Muharsono (2021). Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas aplikasi sistem keuangan desa di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, serta faktor penghambat dalam penggunaan aplikasi sistem keuangan desa di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dalam penggunaan aplikasi sistem keuangan desa antara lain seperti, jika aplikasi sistem keuangan desa mengalami perubahan versi, maka operator segera belajar agar mampu menguasai perubahan pada aplikasi. Operator juga harus sigap dan teliti jika ada perubahan anggaran belanja yang muncul secara mendadak. Dan jika jaringan server sedang error maka operator juga harus menunggu sampai server pulih kembali.

Kedua, Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Kertak Empat Kecamatan Pengaron, Reny Indrianti (2020). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran efektifitas dan kendala dari penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan di Desa Kertak Empat Kecamatan Pengaron. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada 3 (tiga) orang informan, Analisis data menggunakan mode interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di desa Kerak Empat Kecamatan pengaron, Kabupaten Banjar telah menerapkan aplikasi siskeudes sejak tahun 2017 namun dalam penerapannya masih belum efektif dan optimal karena sumber daya atau kapasitas teknis masih belum benar-benar menguasai aplikasi siskeudes serta pada saat ada pembaharuan sistem pegawai cukup lama dalam mempelajari dan beradaptasi dengan sistem baru tersebut.

Ketiga, Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa Aulesa, Matheus Napoleon Mitemen Witak (2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan Desa Aulesa Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan siskeudes dilihat dari indikator keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output dan pencapaian tujuan menyeluruh dapat dikatakan sudah efektif. Namun, terdapat juga kendala pada penggunaan aplikasi siskeudes ini yakni operator siskeudes terhambat jika terjadi perubahan versi dan regulasi yang begitu cepat dari aplikasi siskeudes ini yang sangat mempengaruhi item perbelanjaan yang di set dalam aplikasi siskeudes serta perlu pengenalan dan pelatihan ulang, serta pegawai atau operator perlu mempelajari kembali dari perubahan versi tersebut dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, jumlah pegawai yang kurang atau terbatas juga menjadi tantangan pada pengelolaan informasi di aplikasi Siskeudes [10].

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah fokus peneliti pada Efektivitas Sistem Keuangan Desa di Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Efektivitas Sistem Keuangan Desa di Desa Kebonagung dalam Perwujudan E-Government di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Untuk menguji Efektivitas Siskeudes di Desa Kebonagung, penulis akan menggunakan metode wawancara kualitatif yang dimana penulis dapat menggali pandangan, pengalaman, dan pendapat subjek penelitian mengenai faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektifitas SISKEUDES melalui interaksi personal dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang mendalam dan rinci. Delone dan McLean menyatakan bahwa indikator efektifitas diantaranya sumber daya manusia, kualitas informasi dan kualitas sistem. Ketiga indikator ini penting dalam menentukan tingkat efektifitas Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), terutama dalam menghadapi masalah adaptasi sumber daya manusia dan kendala teknis server yang sering dialami. Kemudian apabila dikaitkan dengan permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Sistem Keuangan Desa dalam Perwujudan E-Government di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

II. METODE

Dalam penelitian terkait "Efektivitas Sistem Keuangan Desa dalam Perwujudan E-Government di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo" menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sebuah karakter suatu variabel, kelompok atau gejala sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat [11]. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menjabarkan secara rinci serta mendalam terkait Eketivitas Sisitem Keuangan Desa dalam Perwujudan E-Governemnt di Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Fokus dalam penelitian ini adalah Efektivitas Sistem Keuangan Desa dalam Perwujudan E-Government di Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori efektifitas menurut DeLone dan McLean (2003) yang terdiri dari tiga indikator, yaitu sumber daya manusia, kualitas sistem, dan kualitas informasi. . Dalam memperoleh informasi atau data-data yang diperlukan untuk mendukung penelitian, maka diperlukan informan sebagai subjek peneliti, yang ditentukan menggunakan Metode *Purposive Sampling* dimana narasumber sudah

ditentukan oleh peneliti [12]. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan yang meliputi Kepala Desa Kebonagung, Sekertaris Desa dan Bendahara Desa Kebonagung yang juga berperan sebagai operator aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data Primer dan Sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau tanpa perantara [13]. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari dokumen, studi kepustakaan atau arsip terkait [14]. Maka dalam memperoleh data penelitian dilakukan analisis pustaka seperti buku, jurnal, artikel, koran, dokumen-dokumen informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang relevan. Adapun model analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) mengacu pada beberapa tahapan [15], antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi yang dibangun oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan dana desa ini bernama SISKEUDES, yang sebelumnya bernama SIMDA Desa. SISKEUDES atau Sistem Keuangan Desa ini merupakan aplikasi untuk dapat memudahkan aparat desa dalam setiap proses penatausahaan, penganggaran, serta pelaporan terkait keuangan desa, sehingga masyarakat desa juga dapat mempercayai kinerja keuangan pemerintah [16]. Melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), pemerintah desa dapat melakukan pencatatan transaksi secara terperinci, melacak pengeluaran, menyusun anggaran, dan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar nasional.

Penggunaan aplikasi Siskeudes telah diterapkan di seluruh desa di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sidoarjo, salah satunya di Desa Kebonagung. Melalui Siskeudes, perangkat desa dapat melakukan pencatatan, pengelolaan, serta pelaporan keuangan secara digital, yang sebelumnya dilakukan secara manual dan sering kali rentan terhadap kesalahan atau kekeliruan pencatatan. Dengan menggunakan teori efektivitas DeLone dan MCLean (2003), hal ini terlihat dari masing-masing dimensi yang memuat variabel-variabel dalam teori efektivitas DeLone dan MCLean (2003): 1. Sumber daya manusia, 2. Kualitas sistem, 3. Kualitas informasi.

A. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan elemen yang penting dalam menyelenggarakan sebuah kegiatan. Individu yang memiliki ketrampilan dan pengetahuannya yang dapat menyelesaikan tugas dengan teliti, tepat, cepat dengan adanya pengalaman pada bidang yang sesuai sehingga bisa mengurangi kemungkinan kesalahan yang dilakukan [17]. Dalam konteks pemerintahan desa, peran SDM tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam pengelolaan program pembangunan, perencanaan, serta implementasi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Peran SDM ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu desa dalam mengelola sumber daya yang ada dan mencapai tujuan yang diinginkan, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bidang yang sangat tergantung pada kualitas SDM adalah pengelolaan keuangan desa, yang merupakan sektor yang sangat sensitif dan membutuhkan tingkat akurasi serta transparansi yang tinggi.

Tabel 4. Stakeholder dalam Pengelolaan Siskeudes Kebonagung

Jabatan	Jenjang Pendidikan
Kepala Desa	Strata 1 (S1)
Sekretaris Desa	Sekolah Menengah Atas (SMA)
Bendahara Desa	Strata 1 (S1)

Sumber : Hasil Olah Peneliti (2025)

Tabel di atas menggambarkan bahwa jenjang pendidikan yang dimiliki oleh para stakeholder yang terlibat dalam implementasi Siskeudes cukup beragam, mulai dari tingkat SMA hingga sarjana, yang pada gilirannya dapat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman mereka dalam mengoperasikan aplikasi serta kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang. Perbedaan tingkat pendidikan ini juga berpotensi memengaruhi kecepatan mereka dalam memahami pembaruan sistem yang dilakukan secara berkala, di mana individu dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi mungkin lebih mudah untuk menyesuaikan diri dibandingkan mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Hal ini menjadi tantangan besar karena setiap perangkat desa harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara kerja aplikasi serta fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi Siskeudes tidak hanya bergantung pada adanya aplikasi yang baik, tetapi juga pada kemampuan SDM dalam beradaptasi dengan teknologi dan memanfaatkan aplikasi ini secara maksimal. Tanpa adanya

kesiapan dan kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi, penggunaan teknologi ini tidak akan memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM dalam menghadapi teknologi menjadi hal yang sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.

Meskipun aplikasi Siskeudes memiliki tujuan yang baik untuk menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan desa, implementasinya di Desa Kebonagung masih dihadapkan pada beberapa kendala yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah kesulitan perangkat desa, khususnya bagian Kaur Keuangan, dalam beradaptasi dengan pembaruan atau perubahan yang terjadi pada sistem aplikasi. Setiap kali aplikasi ini mengalami pembaruan atau penambahan fitur baru, perangkat desa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempelajari dan menguasai perubahan tersebut. Proses adaptasi yang lambat ini sering kali menyebabkan hambatan dalam pengoperasian aplikasi, yang pada akhirnya mengganggu kelancaran proses administrasi keuangan desa.

Permasalahan ini semakin diperburuk dengan tidak adanya pelatihan lanjutan setelah pembaruan sistem. Seringkali, setelah pembaruan aplikasi, tidak ada pelatihan tambahan atau pendampingan dari pihak yang lebih berkompeten, yang mengakibatkan perangkat desa merasa kesulitan untuk mengikuti perkembangan aplikasi. Ketidakterdediaan pelatihan yang memadai membuat perangkat desa tidak dapat memanfaatkan fitur-fitur baru atau perubahan antarmuka aplikasi secara optimal. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan dalam mengelola dan melaporkan keuangan desa dengan efisien, serta meningkatkan potensi terjadinya kesalahan dalam penginputan data, keterlambatan pelaporan, dan ketidakakuratan informasi keuangan yang disampaikan. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan Bendahara Desa Kebonagung, yang menyatakan:

"Setiap kali ada pembaruan pada aplikasi Siskeudes, kami merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri. Kadang-kadang, perubahan fitur atau antarmuka aplikasi sangat berbeda dari sebelumnya, dan kami harus belajar lagi dari awal. Proses adaptasi ini memakan waktu dan membuat kami terkadang kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas keuangan desa dengan tepat waktu. Kami juga tidak mendapat pelatihan tambahan setelah adanya pembaruan, sehingga kami harus mencari tahu sendiri cara menggunakan fitur baru tersebut. Kami merasa sangat terbantu jika ada pendampingan langsung atau panduan yang jelas untuk menghadapi perubahan tersebut, sehingga kami tidak merasa kebingungan setiap kali ada pembaruan sistem." (Hasil Wawancara, 27 Desember 2024).

Pernyataan ini menyoroti kenyataan bahwa setiap pembaruan yang terjadi pada aplikasi Siskeudes, meskipun dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan penggunaan, justru menambah beban kerja perangkat desa. Proses adaptasi yang memakan waktu dan ketidaktahuan tentang fitur baru atau perubahan antarmuka aplikasi menyebabkan frustrasi, kebingungan, dan ketidakmampuan untuk memanfaatkan sistem secara maksimal. Hal ini mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan desa, yang seharusnya menjadi lebih efisien, namun justru terhambat oleh proses adaptasi yang lambat. Pembaruan sistem tanpa adanya pelatihan atau pendampingan yang cukup menyebabkan perangkat desa tidak siap menghadapi perubahan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Kebonagung dalam wawancara kali ini:

"Sejak awal penggunaan aplikasi Siskeudes hingga saat ini, tidak pernah ada pelatihan sama sekali terkait penggunaan aplikasi tersebut. Perangkat desa harus belajar secara mandiri tanpa adanya bimbingan resmi, sehingga banyak yang merasa kesulitan untuk memahami fitur-fitur yang ada. Hal ini menjadi tantangan besar, terutama ketika terjadi pembaruan sistem atau penambahan fitur baru yang sering kali memiliki perbedaan signifikan dibandingkan versi sebelumnya." (Hasil Wawancara, 27 Desember 2024).

Dengan tidak adanya pelatihan dan pendampingan ini dapat memiliki dampak serius terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. Salah satu risiko yang muncul adalah kesalahan dalam penginputan data, yang dapat memengaruhi ketepatan laporan keuangan yang disampaikan ke pihak yang lebih tinggi. Jika pengelolaan keuangan desa terganggu dan laporan keuangan tidak akurat, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan menurunkan tingkat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan aplikasi Siskeudes untuk memperhatikan faktor sumber daya manusia ini dalam implementasi aplikasi. Berdasarkan hasil penelitian lapangan terdapat persamaan hasil dari penelitian terdahulu menurut Matheus Napoleon Mitemen Witak bahwa pada indikator sumber daya manusia pada "Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa Aulesa", pada penelitian ini terdapat hambatan yaitu kurangnya keterampilan teknis di kalangan perangkat desa dalam menggunakan aplikasi Siskeudes. Selain itu adaptasi terhadap pembaruan sistem juga menjadi tantangan tersendiri bagi perangkat desa yang tidak terbiasa dengan perubahan sistem secara berkala.

B. Kualitas Sistem

Kualitas sistem merupakan pengukuran proses sistem informasi yang mengutamakan hasil interaksi antara pengguna dan sistem. Kualitas sistem berkaitan dengan fleksibilitas sistem, integrasi sistem, kemudahan dan kenyamanan penggunaan, keandalan sistem, serta adanya fitur sistem yang intuitif, canggih, dan responsif [18]. Dalam konteks aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), kualitas sistem sangatlah penting karena aplikasi ini digunakan untuk mengelola keuangan desa, yang menjadi salah satu aspek kunci dalam pengelolaan pemerintahan desa yang efisien dan transparan. Aplikasi yang berkualitas harus mampu memproses data dengan cepat, akurat, dan tanpa gangguan teknis yang berarti. Keandalan sistem dalam menjaga kestabilan operasional dan mencegah downtime sangat berpengaruh pada keberhasilan sistem tersebut. Selain itu, kinerja sistem harus cukup cepat untuk memproses data dalam jumlah besar, terutama selama periode laporan keuangan yang sibuk. Kemudahan dalam penggunaan juga menjadi faktor yang tidak kalah penting karena perangkat desa yang menggunakan aplikasi ini mungkin tidak memiliki latar belakang teknis, sehingga antarmuka yang sederhana dan intuitif akan sangat membantu mereka dalam menjalankan tugasnya. Sistem yang berkualitas juga harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi data keuangan yang sangat sensitif, agar informasi yang disimpan tetap aman dan terjaga dari potensi ancaman cyber. Oleh karena itu, kualitas sistem Siskeudes yang baik menjadi sangat penting dalam mendukung kelancaran administrasi keuangan desa, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa.

Meskipun aplikasi Siskeudes di Desa Kebonagung diharapkan dapat membawa kemajuan dalam pengelolaan keuangan desa yang lebih efisien, aplikasi ini sering kali menghadapi kendala yang berkaitan langsung dengan kualitas sistem. Salah satu permasalahan yang paling sering dihadapi adalah gangguan teknis berupa error atau server down yang menyebabkan aplikasi tidak dapat diakses dengan baik. Ketika aplikasi mengalami gangguan, perangkat desa, terutama bagian Kaur Keuangan, tidak dapat mengakses data atau melanjutkan tugas-tugas penting mereka, seperti penginputan transaksi atau penyusunan laporan keuangan. Gangguan teknis ini menyebabkan keterlambatan yang signifikan dalam proses administrasi keuangan, yang tentunya berdampak buruk pada ketepatan waktu pelaporan dan transparansi pengelolaan anggaran desa. Selain itu, masalah kualitas sistem ini memperburuk efektivitas dan efisiensi aplikasi Siskeudes sebagai alat pengelola keuangan, karena waktu yang terbuang akibat gangguan teknis dapat mengganggu fokus dan konsentrasi perangkat desa dalam menjalankan tugas mereka.

Gambar 2. Tampilan Siskeudes Kebonagung Ketika Error



Sumber : Hasil Olah Peneliti (2025)

Gambar tersebut menunjukkan tampilan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang mengalami gangguan atau error pada server. Pesan kesalahan yang muncul kemungkinan menunjukkan bahwa sistem sedang mengalami masalah teknis, seperti koneksi ke server yang terputus, pemeliharaan sistem yang sedang berlangsung, atau beban server yang terlalu tinggi. Pada saat sistem mengalami error, perangkat desa yang sedang bekerja dengan aplikasi Siskeudes tiba-tiba tidak dapat mengakses data atau melanjutkan pekerjaan mereka. Perangkat mengalami keterlambatan dalam memuat data hingga akhirnya sistem benar-benar tidak merespon. Gangguan ini sering kali terjadi di tengah proses penginputan data keuangan, sehingga menyebabkan pekerjaan harus terhenti secara mendadak. Akibatnya, perangkat desa harus menunggu hingga sistem kembali normal atau beralih ke metode pencatatan manual yang lebih lambat dan berisiko tinggi terhadap kesalahan. Hal ini juga berisiko menyebabkan ketidakakuratan dalam penginputan data atau pembuatan laporan, yang pada gilirannya dapat menurunkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Menurut wawancara dengan Bendahara Desa Kebonagung, beliau mengungkapkan:

"Kami sering menghadapi masalah teknis dengan aplikasi Siskeudes, terutama ketika aplikasi tiba-tiba error atau servernya down. Hal ini sangat mengganggu karena kami tidak bisa melanjutkan pekerjaan penting seperti penginputan data atau pembuatan laporan keuangan yang harus segera diselesaikan. Kami harus menunggu beberapa saat sampai aplikasi kembali normal, tetapi waktu yang hilang cukup banyak. Selama gangguan teknis, kami terpaksa menggunakan metode manual untuk menyelesaikan tugas, yang tentu saja lebih memakan waktu dan meningkatkan risiko kesalahan. Proses administrasi keuangan menjadi lebih lambat dan terkadang kami

bahkan kesulitan memenuhi tenggat waktu pelaporan. Kami merasa sangat kesulitan jika masalah teknis seperti ini terjadi pada saat-saat penting." (Hasil Wawancara, 27 Desember 2024).

Pernyataan ini menggambarkan bagaimana masalah kualitas sistem seperti gangguan teknis atau server down dapat secara langsung mengganggu kelancaran pengelolaan keuangan desa. Terhambatnya akses ke aplikasi Siskeudes membuat perangkat desa, khususnya Kaur Keuangan, terpaksa beralih ke metode yang lebih konvensional dan memakan waktu, yang tentunya merugikan efisiensi operasional mereka.

Tabel 5. Kualitas sistem yang sering mengalami error

No	Jenis Masalah Sistem	Tanggal Terjadi	Durasi gangguan
1.	Error pada proses penginputan data anggaran	15 Januari 2024	1 Jam
2.	Server down pada saat pengajuan laporan keuangan	2 Februari 2024	2 Jam
3.	Error pada pembaruan data pengguna aplikasi	21 Maret 2024	1 Jam
4.	Aplikasi tidak dapat memproses laporan tahunan	15 Juni 2024	2 Jam
5.	Kesalahan Sinkronisasi data antara desa dan pusat	2 Agustus 2024	30 Menit

Sumber : Hasil Olah Peneliti (2025)

Dari penjelasan tabel di atas, menggambarkan bahwa kualitas sistem aplikasi Siskeudes yang digunakan di Desa Kebonagung sering kali mengalami gangguan teknis, seperti error atau server down, yang mengganggu kelancaran proses pengelolaan keuangan desa. Kejadian-kejadian ini sangat berdampak pada aktivitas operasional harian di desa, terutama dalam hal penginputan dan pelaporan anggaran. Ketika aplikasi mengalami error atau server down, perangkat desa tidak dapat mengakses sistem secara langsung untuk memverifikasi, mengedit, atau memperbarui data anggaran yang sedang dikelola. Dampak lainnya adalah peningkatan risiko kesalahan dalam penginputan data atau pengelolaan anggaran, yang tentu saja berdampak pada kualitas laporan keuangan yang disampaikan ke pihak yang lebih tinggi. Kepala Desa Kebonagung juga menambahkan dalam wawancara:

"Masalah kualitas sistem pada aplikasi Siskeudes sangat memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa kami. Setiap kali terjadi gangguan, seperti server down atau aplikasi mengalami error, kami tidak bisa memantau dan mengelola perkembangan keuangan desa dengan optimal. Hal ini menyebabkan kendala besar, terutama dalam memastikan data keuangan yang tercatat sesuai dengan kondisi aktual. Keandalan sistem sangat penting, karena jika aplikasi Siskeudes tidak dapat berfungsi dengan baik, kami tidak dapat melakukan verifikasi atau pembaruan data dengan tepat waktu. Akibatnya, kami terpaksa menunggu hingga sistem kembali berfungsi, yang tentu saja menghambat alur administrasi kami. Saya sangat khawatir jika masalah ini terus berlanjut tanpa adanya solusi yang jelas, laporan keuangan yang kami buat bisa terlambat atau bahkan tidak akurat. Hal ini bisa berimbas pada ketepatan anggaran yang kami laporkan kepada pemerintah pusat atau pihak yang lebih tinggi, yang pada akhirnya mengganggu ritme dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa kami. Kami sangat membutuhkan solusi cepat dan efektif agar aplikasi Siskeudes ini bisa berjalan dengan lancar tanpa gangguan teknis yang terus berulang, karena gangguan yang sering terjadi tidak hanya memperburuk produktivitas perangkat desa tetapi juga bisa merusak citra pemerintah desa di mata masyarakat." (Hasil Wawancara, 27 Desember 2024).

Pernyataan kepala desa ini menggambarkan betapa krusialnya kualitas sistem aplikasi Siskeudes dalam kelancaran pengelolaan keuangan desa. Gangguan teknis yang terjadi tidak hanya menghambat kinerja perangkat desa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga berdampak langsung pada proses pengawasan dan pelaporan yang harus dilakukan secara transparan dan tepat waktu. Keterlambatan dalam pelaporan atau kesalahan data yang disebabkan oleh gangguan teknis dapat menurunkan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, yang pada akhirnya akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Pemerintah desa sangat bergantung pada kelancaran aplikasi Siskeudes untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, karena ketepatan waktu dan kebenaran data menjadi penentu dalam mempertahankan kredibilitas administrasi keuangan. Jika permasalahan kualitas sistem ini tidak segera diperbaiki, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan tergerus, yang bisa berakibat pada penurunan partisipasi masyarakat dalam berbagai program atau kebijakan desa. Kepercayaan adalah

hal yang sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan warganya. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak yang bertanggung jawab, baik itu pengembang aplikasi Siskeudes maupun pihak terkait lainnya, untuk segera mencari solusi jangka panjang yang dapat memastikan aplikasi ini tetap berfungsi dengan baik, stabil, dan bebas dari gangguan teknis yang dapat merugikan kinerja pemerintah desa serta mengurangi kredibilitasnya di mata masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terdapat persamaan hasil dari penelitian terdahulu menurut Matheus Napoleon Mitemen Witak bahwa pada indikator kualitas sistem pada “Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa Aulesa”, pada penelitian ini terdapat hambatan yaitu seringnya gangguan server memengaruhi kelancaran operasional perangkat desa dalam mengelola dan melaporkan keuangan. Hal ini memperlambat proses pencairan dana desa dan pembuatan laporan, serta menyebabkan ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan desa.

C. Kualitas Informasi

Kualitas informasi merupakan kualitas output yang berupa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang digunakan [19]. Informasi yang berkualitas sangat penting dalam setiap proses pengambilan keputusan, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes. Selain itu, kualitas informasi merupakan karakteristik yang diinginkan dari output sistem [20]. Kualitas informasi berfokus pada kualitas informasi yang dihasilkan dan manfaatnya untuk pengguna. Informasi yang akurat, relevan, dan terkini memastikan bahwa pengelolaan dana desa berjalan dengan lancar, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini, kualitas informasi diukur berdasarkan kemampuan sistem untuk menghasilkan data yang sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan pengguna, serta memastikan bahwa informasi tersebut mudah diakses dan dipahami oleh pihak yang berwenang. Ketepatan waktu pengambilan dan pembaruan data juga merupakan salah satu indikator kualitas informasi yang tidak dapat diabaikan. Dalam pemerintahan desa, kualitas informasi sangat berkaitan erat dengan kemampuan untuk membuat laporan yang akurat, serta untuk memantau dan mengelola anggaran desa secara efektif. Tanpa adanya informasi yang berkualitas, proses pengelolaan keuangan desa akan terhambat, dan pengambilan keputusan yang tepat sulit untuk dilakukan.

Di Desa Kebonagung, pengelolaan dana desa melalui aplikasi Siskeudes mengalami kendala yang cukup serius terkait dengan kualitas informasi. Salah satu permasalahan utama adalah kesulitan yang dihadapi perangkat desa saat mereka menginput dana desa ke dalam sistem aplikasi. Minimnya pegawai menjadi penghalang utama dalam proses ini. Terbatasnya pegawai mempengaruhi informasi yang diberikan, perangkat desa tidak dapat memproses data dengan tepat waktu. Selain itu, pegawai juga seringkali terlambat memberikan informasi kepada masyarakat terkait anggaran desa.

Gambar 3. APBDes Kebonagung Tahun 2024

APBDES 2024 DESA KEBONAGUNG KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO	
1. PENDAPATAN DESA	RP. 2.453.339.863,00
A. PENDAPATAN ASLI DESA	RP. 86.040.000,00
B. PENDAPATAN TRANSFER	RP. 2.367.299.863,00
ALOKASI DESA DESA	RP. 448.183.047,00
DANA DESA	RP. 1.385.676.000,00
BAGI HASIL PADAI, DAN RETRIBUSI	RP. 533.441.816,00
2. BELANJA DESA	RP. 2.450.709.935,01
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	RP. 1.305.972.685,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	RP. 506.502.250,00
BIDANG PEMBINAAN WEMASYARAKAT DESA	RP. 159.200.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	RP. 285.435.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA	RP. 183.600.000,00
KEADAAN DARURAT, DAN MENDESAK DESA	
3. PEMBIAYAAN DESA	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	RP. 2.629.927,99
ENGELUARAN PEMBIAYAAN	RP. 97.370.072,01
	RP. 100.000.000,00

Sumber : Hasil Olah Peneliti (2025)

Gambar di atas menampilkan APBDes tahun 2024 Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, yang berisi rincian pendapatan dan belanja desa untuk berbagai sektor. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sering terjadi keterlambatan dalam penyampaian informasi APBDes tahunan kepada masyarakat, sehingga warga desa kesulitan dalam mengakses data keuangan desa secara tepat waktu. Keterlambatan ini dapat berdampak pada kurangnya transparansi serta minimnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengawal penggunaan anggaran desa.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan keterlambatan tersebut adalah kurangnya pegawai di pemerintahan desa, yang berdampak pada lambannya proses administrasi terkait pengolahan, verifikasi, serta publikasi APBDes. Dengan jumlah tenaga kerja yang terbatas, tugas-tugas penting dalam penyusunan dan penyampaian laporan anggaran desa sering kali tertunda, menyebabkan informasi yang seharusnya segera diumumkan kepada masyarakat mengalami keterlambatan. Hal ini semakin diperparah oleh tingginya beban kerja yang harus ditangani oleh perangkat desa yang ada, sehingga mereka harus membagi waktu dan tenaga untuk berbagai tugas lainnya, yang pada akhirnya menghambat efisiensi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Selain itu, ketidakmampuan perangkat desa untuk mengakses atau memperbarui data anggaran secara real-time juga berimbas pada kualitas informasi yang dihasilkan. Ketika data anggaran tidak dapat diperbarui secara langsung atau ketika sistem tidak dapat memproses informasi dengan cepat, maka data yang tersedia menjadi usang dan tidak lagi mencerminkan kondisi yang aktual. Akibatnya, informasi yang disampaikan kepada pihak yang berwenang, seperti pemerintah pusat atau masyarakat, menjadi tidak akurat dan tidak dapat diandalkan. Hal ini tentunya merusak tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, yang seharusnya menjadi tujuan utama penggunaan aplikasi Siskeudes. Menurut wawancara dengan Bendahara Desa Kebonagung, beliau mengungkapkan:

"Ketika kami mulai menginput dana desa, kami sering kali kesulitan mengupdate terkait dana desa atau masalah keuangan yang lain karena jumlah pegawai disini terbatas, hanya saya saja. Hal ini membuat saya tidak bisa memproses data dengan cepat dan tepat waktu. Proses pengajuan dana desa menjadi tertunda, dan kami tidak dapat mengupdate anggaran desa sesuai dengan perkembangan terbaru. Pada akhirnya, keterlambatan ini menghambat pencairan dana yang seharusnya segera diproses untuk pelaksanaan program. Kami merasa sangat terbebani dengan masalah ini, karena tanpa data yang akurat dan terbaru, kami tidak bisa melaksanakan tugas kami dengan baik. Keterlambatan ini tidak hanya merugikan kami, tetapi juga merugikan masyarakat yang bergantung pada program-program yang didanai dengan dana desa." (Hasil Wawancara, 27 Desember 2024).

Pernyataan Bendahara desa ini menggambarkan bagaimana kurangnya pegawai menyebabkan keterlambatan dalam pengelolaan anggaran desa. Tanpa informasi yang akurat dan terkini, perangkat desa tidak dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik, yang berdampak langsung pada kelancaran pengelolaan keuangan desa. Hal ini juga menunjukkan betapa krusialnya kualitas informasi dalam memastikan bahwa data keuangan desa yang disampaikan kepada pihak terkait adalah tepat waktu dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sekertaris Desa Kebonagung juga menambahkan dalam wawancara:

"Masalah ini sering kali mengganggu kami saat menginput anggaran dana desa. Keterlambatan ini tidak hanya menyebabkan proses administrasi menjadi lebih lambat, tetapi juga berisiko membuat kami tidak dapat memberikan laporan yang tepat waktu. Informasi yang tidak terupdate dengan baik karena jumlah pegawai yang terbatas membuat kami kesulitan dalam memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat dan pihak yang berwenang secara real time atau tepat waktu. Kami berharap tentunya untuk kedepannya ada penambahan pegawai baru agar proses penginputan dan pencairan dana desa bisa lebih cepat dan tepat waktu. Kami sangat membutuhkan tenaga kerja tambahan, karena ini berhubungan langsung dengan program-program yang diharapkan dapat segera dilaksanakan di desa." (Hasil Wawancara, 27 Desember 2024).

Pernyataan Sekretaris Desa ini menekankan bagaimana masalah kurangnya tenaga kerja atau pegawai yang berdampak pada kualitas laporan yang diberikan kepada pihak yang berwenang maupun masyarakat. Keterlambatan dalam memberikan informasi yang jelas dan akurat akan merusak kredibilitas administrasi desa dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dalam hal ini, ketepatan waktu dan akurasi informasi sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan cara yang transparan, efisien, dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat persamaan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Matheus Napoleon Mitemen Witak dalam penelitiannya yang berjudul "Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa Aulesa". Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa salah satu hambatan utama dalam meningkatkan kualitas informasi adalah kurangnya jumlah tenaga kerja dalam pengelolaan sistem keuangan desa. Keterbatasan pegawai ini berdampak pada lambatnya proses penginputan dan pembaruan data ke dalam sistem, sehingga informasi yang dihasilkan sering kali tidak *real-time*. Akibatnya, proses pengambilan keputusan serta pelaporan keuangan desa menjadi kurang optimal dan dapat mempengaruhi tingkat akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan desa sebagai bagian dari perwujudan e-government. SISKEUDES memungkinkan pemerintah desa untuk melakukan pencatatan transaksi secara lebih sistematis, melacak pengeluaran dengan lebih rinci, serta menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar nasional. Hal ini memberikan kemudahan dalam proses administrasi keuangan desa serta meningkatkan pengawasan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi sehingga efektivitas SISKEUDES belum sepenuhnya optimal. Salah satu faktor utama yang menjadi tantangan yaitu Pertama, sumber daya manusia (SDM). Pemerintah desa masih menghadapi kesulitan dalam mengadaptasi perubahan sistem dan fitur baru yang diperbarui secara berkala. Keterbatasan pelatihan serta kurangnya pendampingan teknis menyebabkan operator SISKEUDES mengalami kesulitan dalam memahami dan mengoperasikan sistem dengan optimal. Selain itu, perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam penggunaan teknologi juga menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan perangkat desa dalam mengelola aplikasi ini secara efektif. Kedua, selain aspek SDM, kualitas sistem juga menjadi tantangan yang signifikan dalam penerapan SISKEUDES. Gangguan teknis seperti server yang sering mengalami error atau down pada saat penggunaan sangat berdampak pada kelancaran administrasi keuangan desa. Gangguan tersebut menyebabkan keterlambatan dalam pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, serta pengajuan dana desa. Masalah ini diperparah dengan terbatasnya dukungan teknis yang tersedia untuk mengatasi kendala yang terjadi secara cepat dan efektif. Ketiga, kualitas informasi yang dihasilkan melalui SISKEUDES juga masih menghadapi kendala. Keterlambatan dalam pembaruan data anggaran desa dan kurangnya tenaga kerja dalam mengelola sistem menyebabkan informasi yang disajikan tidak selalu bersifat real-time. Hal ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang berbasis data serta mengurangi efektivitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, keterbatasan jumlah pegawai yang bertanggung jawab atas penginputan dan verifikasi data menyebabkan proses administrasi keuangan berjalan lebih lambat, yang pada akhirnya berdampak pada efisiensi penggunaan dana desa dan transparansi kepada masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan SISKEUDES. Pertama, diperlukan pelatihan secara berkala bagi perangkat desa agar mereka dapat memahami dan menguasai sistem dengan lebih baik. Kedua, peningkatan kualitas sistem melalui perbaikan infrastruktur teknologi dan penguatan server sangat penting untuk memastikan bahwa aplikasi SISKEUDES dapat berjalan dengan lebih stabil dan minim gangguan teknis. Ketiga, peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam sistem berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa SISKEUDES memiliki potensi besar dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih baik dan lebih transparan. Namun, efektivitasnya masih tergantung pada kesiapan sumber daya manusia, kualitas sistem yang digunakan, serta kelancaran dalam penyajian informasi keuangan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah desa, pemerintah pusat, serta pihak pengembang aplikasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja SISKEUDES agar dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha atas segala limpahan rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan jurnal ini tidak terlepas dari berbagai bantuan, dukungan, dan bimbingan yang diberikan oleh banyak pihak. Oleh itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dan penyelesaian jurnal ini. Penulis secara khusus menyampaikan apresiasi dan rasa hormat yang mendalam kepada pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk memberikan arahan, saran, serta kritik yang membangun demi menyempurnakan hasil penelitian ini. Dukungan dan bimbingan yang konsisten dari pembimbing menjadi sumber motivasi yang sangat berarti dalam setiap tahap penelitian, mulai dari proses perencanaan, pengumpulan data, analisis hasil, hingga penyusunan laporan akhir.

Ucapan kasih juga disampaikan kepada institusi dan lembaga terkait yaitu pihak Desa Kebonagung yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk fasilitas, sumber daya, maupun akses informasi yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung. Bantuan ini sangat mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian dan menghasilkan analisis yang lebih mendalam. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan dukungan moral maupun teknis. Diskusi, masukanserta bantuan mereka dalam berbagai aspek teknis dan akademik sangat membantu penulis dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi selama proses penelitian. Selain itu, penulis juga ingin mengapresiasi seluruh partisipan yang telah bersedia

meluangkan waktu untuk berkontribusi dalam pengumpulan data dan memberikan informasi yang relevan bagi penelitian ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk memperbaiki dan mengembangkan penelitian ini di masa mendatang. Penulis juga berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang nyata, tidak hanya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai referensi dan inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

REFERENSI

- [1] Y. Mulyadi, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis," *Dinamika*, vol. 5.2, pp. 1689–1699, 2018, [Online]. Available: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1459>.
- [2] Muharsono and Linda Asfiah, "Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Tentang Aplikasi Pelaporan Keuangan Desa Di Desa Wajak Lor Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)," *Publiciana*, vol. 14, no. 02, pp. 328–338, 2021, doi: 10.36563/publiciana.v14i02.298.
- [3] D. Dan, D. Terhadap, K. Pelayanan, H. Lathifah, A. Frinaldi, and N. E. Putri, "Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan," vol. 11, no. 2, pp. 585–592, 2024.
- [4] R. Indrianti, M. Herman, and F. Fibriyanita, "Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Kertak Empat Kecamatan Pangaron," *J. Eprints.Uniska*, vol. 5, no. 1, pp. 1–10, 2020.
- [5] R. H. 2020 Laila Herawati, "EFFECTIVENESS OF APPLICATION OF VILLAGE FINANCIAL SYSTEM APPLICATION (SISKEUDES) IN TANTARINGIN VILLAGE MUARA HARUS SUB-DISTRICT TABALONG REGENCY ABSTRACT This research was conducted in Tantaringin Village muara harus sub-district . This research aims t," vol. 3, no. 1, pp. 857–869, 2020.
- [6] I. Elfirar and N. E. Putri, "Penerapan Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Nagari Selayo," *J. Adm. Pemerintah. Desa*, vol. 5, no. 1, p. 11, 2024, doi: 10.47134/villages.v5i1.90.
- [7] K. G. Asih and I. M. P. Adiputra, "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0.3 Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19," *JIMAT (Jurnal Ilm. Mhs. Akuntansi)*, vol. 13, no. 1, pp. 12–23, 2022.
- [8] D. I. Kecamatan and B. Kabupaten, "ANALISIS PENGARUH KUALITAS SISTEM DAN KUALITAS INFORMASI TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA APLIKASI SISKEUDES DI KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO," *J. Manaj. dan Akunt.*, vol. 12, no. 1, pp. 1–19, 2023.
- [9] Y. Deswita, S. Pascasarjana, and U. L. Kuning, "TRANSFORMASI DIGITAL DALAM TATA KELOLA KEUANGAN DESA : DAMPAK PELATIHAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI Pendahuluan," vol. 2, no. 1, pp. 111–119, 2025.
- [10] N. M. Witak, Y. F. Angi, and N. T. Kiak, "Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa Aulesa," vol. 3, no. 8, pp. 3363–3388, 2023.
- [11] K. Tabalong and P. K. Selatan, "EFEKTIVITAS PENERAPAN PRAKTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DESA," vol. 5, pp. 215–228, 2022.
- [12] N. Juli, "Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang," vol. 6, no. 3, pp. 10483–10495, 2022, doi: 10.36312/jisip.v6i3.3572/http.
- [13] S. Ilham and K. E. V. I. Lusiani, "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka," 2022.
- [14] A. Faizah and K. Kunci, "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun," vol. 5, no. 1, pp. 763–776, 2022.
- [15] B. F. Auliantari, U. Mataram, E. Indriani, U. Mataram, Y. Mariadi, and U. Mataram, "IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA MENGGUNAKAN," vol. 2, no. 3, pp. 416–433, 2022.
- [16] D. Nadaa and E. Priyanti, "Inovasi Digital dalam Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SISKEUDES," *Matra Pembaruan*, vol. 7, no. 1, pp. 61–73, 2023, doi: 10.21787/mp.7.1.2023.61-73.
- [17] B. N. Isnaini and E. T. Saputra, "Pengaruh Pengetahuan Sumber Daya Manusia , Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kasupaten Sukoharjo)," no. 4, 2024.
- [18] A. K. Sistem, K. Informasi, and D. A. N. Kualitas, "Analisis kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna pada sistem aplikasi keuangan tingkat instansi satuan kerja," vol. 20,

- no. 1, pp. 18–37, 2023.
- [19] J. Ilmiah, M. Akuntansi, and U. P. Ganesha, “PENGARUH KUALITAS SISTEM DAN KUALITAS INFORMASI TERHADAP KEPUASAAN PENGGUNA ENTERPRISE RESOURCE PLANNING-SYSTEM APPLICATION AND PRODUCT IN DATA PROCESSING (ERP-SAP) DENGAN PERCEIVED USEFULNESS SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PELINDO I (PERSERO) SUMATERA,” *J. Ilm. Mhs. Akunt.*, vol. 12, no. 1, pp. 1046–1057, 2021.
- [20] R. S. Fracini and Y. Suhari, “Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pengguna SILALAPBAJA,” vol. 17, no. 1, pp. 176–187, 2024.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.